

KERAGAAN PENGEMBANGAN KAPAS DI INDONESIA

Teger Basuki dan Joko Hartono^{*)}

PENDAHULUAN

Pengembangan suatu komoditas pertanian agar berhasil harus memperhatikan berbagai aspek terutama: teknis, sosial ekonomi, dan lingkungan (Soekartawi *et al.* 1985). Kapas di Indonesia sudah mulai dikembangkan sejak zaman Belanda, zaman Jepang, sampai Indonesia merdeka (Lahiya 1984). Bila kita evaluasi, sampai saat ini belum nampak keberhasilannya karena pemerintah dan pihak-pihak yang terkait kurang, bahkan belum memperhatikan ketiga faktor tersebut di atas (Basuki *et al.* 2007). Salah satu contoh dalam pengembangan kapas hibrida yang mensyaratkan ketersediaan air dan sarana produksi tinggi, tetapi ditanam pada lahan kering tadah hujan tanpa usaha pemberian air yang optimal, sehingga produktivitasnya tidak sesuai dengan harapan (Hasnam *et al.* 2007).

Selama ini pengembangan kapas di Indonesia dilakukan melalui pola perkebunan rakyat di lahan petani yang sebagian besar mempunyai lahan sempit (0,25–0,50 hektar di Jawa dan 0,5–1 hektar di luar Jawa), pada umumnya petani mengutamakan tanaman pangan sehingga pengembangannya dengan pola tumpang sari, tumpang sisip, maupun tumpang gilir. Tumpang sari kapas dengan kedelai di Lamongan memberikan pendapatan kepada petani sebesar Rp3.758.500,00 per hektar (Sahid *dalam* Kadarwati dan Rahmianna 2006). Begitu juga tumpang sisip kapas dengan jagung di Grobogan yang memberikan pendapatan petani sebesar Rp4.043.050,00 per hektar.

Bertambahnya jumlah penduduk akan menambah kebutuhan bahan baku sandang. Selain itu meningkatnya produksi tekstil Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor akan meningkatkan jumlah impor serat kapas, jumlahnya mencapai lebih dari 99% dari kebutuhan serat kapas nasional rata-rata 554.000 ton setiap tahun (Djamaludin 2007).

Upaya pengadaan kapas di dalam negeri telah dilaksanakan dalam bentuk Proyek Kapas Nusa Tenggara (PKNT) pada era tahun 1960-an dan proyek IKR (intensifikasi kapas rakyat) yang dimulai sejak musim tanam tahun 1978/1979 sampai saat ini. Dalam pelaksanaan proyek IKR, perkembangan areal, produksi, dan produktivitas berfluktuasi yang dikarenakan adanya berbagai kendala di lapangan (Basuki *et al.* 2007).

Tujuan penulisan ini yaitu mengidentifikasi keragaan pengembangan kapas di Indonesia serta mencoba memberikan saran pengembangannya.

^{*)} Masing-masing Peneliti pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Malang

KERAGAAN USAHA TANI KAPAS DI INDONESIA

Dari pemantauan penulis selama 20 tahun terakhir, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan tentang usaha tani kapas di Indonesia, antara lain:

1. Luas areal yang fluktuatif dan cenderung menurun terutama pada lima tahun terakhir, namun tetap “eksis” dibanding pengusahaan kapas secara “*estate*” yang pernah dirintis di Pulau Sumbawa (NTB) dan di Sulawesi Tenggara yang tidak berkelanjutan.
2. Tingkat produktivitas kapas rakyat yang hanya 600 kg/hektar kapas berbiji dan harga yang rendah (dua tahun terakhir sebesar Rp4.200,00 per kg kapas berbiji) masih belum kompetitif dibanding tanaman pangan, sehingga petani masih mengutamakan tanaman pangan. Kapas ditanam di sela-sela tanaman jagung, kedelai, maupun kacang tanah atau kacang hijau, kapas mengalami pertumbuhan normal karena tidak ternaungi setelah tanaman pangan dipanen, pada saat itu sudah mulai musim kemarau. Apabila tidak ada usaha pemberian air atau penyiraman di musim kemarau, maka produktivitas kapas rendah bahkan “puso”. Dengan pemberian air secara tradisional yaitu satu gelas (200 cc) air ditambah pupuk urea \pm 3 gram untuk setiap tanaman kapas setiap kali penyiraman, dan penyiraman dilaksanakan sebanyak 3 kali selama pertumbuhan tanaman kapas, dapat menghasilkan 650 kg s.d. 1.024 kg kapas berbiji per hektar (Nurindah *et al.* 2008; Sulistyowati 2009).
3. Ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida kimiawi masih tinggi, sehingga pendampingan teknologi masih sangat diperlukan agar teknologi tersebut cepat diadopsi oleh petani (Sulistyowati 2009). Teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) telah ditemukan oleh Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat (Balittas). Dari hasil penelitian skala luas (3–4 hektar) pada musim tanam tahun 2009 di Desa Jati, Kec. Jati, Kabupaten Blora yang mengikutsertakan petani secara aktif membuktikan bahwa teknologi PHT dapat menghemat biaya produksi sebesar Rp250.000,00 hingga Rp350.000,00 per hektar (Sulistyowati 2009).
4. Harga kapas berbiji di dalam negeri masih rendah Rp4.200,00 per kg, sehingga komoditas ini kurang menarik bagi petani. Harga serat kapas dunia berfluktuasi, contoh pada saat harga serat kapas dunia Rp16.500,00 per kg, harga kapas berbiji di dalam negeri Rp3.000,00 per kg sama dengan harga kapas pada saat harga serat kapas dunia Rp12.500,00 per kg. Keadaan yang demikian ini kemungkinan dipengaruhi oleh bentuk pasar kapas berbiji di dalam negeri yang “oligopsoni” yaitu harga komoditas kapas berbiji ditentukan oleh para pengelola kapas, dan pemerintah tidak banyak berperan dalam penentuan harga tersebut. Hal ini berbeda dengan komoditas pangan yang bentuk pasarnya bebas (bersaing sempurna) yang ditunjukkan dengan jumlah pembeli dan penjual cukup banyak, dan pada umumnya kedua belah pihak saling mengetahui kualitas dan nilai barang yang diperjualbelikan (Teken dan Isnawi 1981).

PERAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KAPAS DI INDONESIA

Lembaga yang terkait dalam pengembangan kapas di Indonesia adalah: lembaga penelitian (Balittas), pengelola, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), lembaga penyuluh, lembaga perkreditan (pengelola, KUD, BRI Unit Desa, dsb.), Dinas Perkebunan, serta kelompok tani (Sahid dan Wahyuni 2001).

Lembaga penelitian sebagai penghasil teknologi budi daya tanaman kapas berperan memasok/menyediakan teknologi budi daya tanaman yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas serat kapas, serta pendapatan petani kapas.

Pengelola berperan dalam hal penyediaan sarana produksi, penyuluhan, dan pembelian kapas berbiji dari petani dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah (misal Rp4.000,00 per kg kapas berbiji).

BPTP berperan dalam hal pengkajian teknologi yang dihasilkan oleh Balittas sebelum diterapkan di lahan petani dan pengembangan diseminasinya. Kerja sama BPTP dengan Dinas Perkebunan di daerah pengembangan kapas diharapkan dapat mempercepat transfer teknologi budi daya dan pengembangan kapas.

Lembaga penyuluh berperan dalam hal transfer teknologi yang dihasilkan dan direkomendasikan oleh Balittas kepada petani.

Lembaga perkreditan berperan dalam hal pemberian kredit untuk pengadaan sarana produksi pada saat petani membutuhkan untuk diaplikasikan kepada tanaman kapas, misalnya: pupuk, pestisida, upah tenaga kerja, dan sebagainya, namun pada kenyataannya petani sering meminjam saprodi kepada rentenir dengan bunga yang tinggi ($\pm 40\%$) yang dibayar pada saat panen. Untuk ini pemerintah perlu mengkaji agar pemberian kredit kepada petani yang dapat menyaingi peran rentenir di daerah pengembangan kapas.

Dinas Perkebunan bertugas sebagai penyuluh dan pendataan areal tanaman perkebunan termasuk kapas, serta menjembatani antara pengelola dengan petani apabila ada masalah pembelian kapas berbiji dan sebagainya.

Kelompok tani merupakan kumpulan petani kapas yang secara bersama-sama mengusahakan tanaman kapas. Lembaga yang paling erat hubungannya dengan kelompok tani yaitu lembaga penyuluh khususnya individu penyuluh yang sangat berperan dalam transfer teknologi budi daya tanaman kapas dari lembaga penelitian/pengkajian kepada kelompok tani.

MASALAH PENGEMBANGAN KAPAS DI INDONESIA

Sebagian besar kapas di Indonesia dikembangkan di lahan kering tadah hujan, apabila diidentifikasi ditemukan beberapa masalah dalam pengembangan kapas selama ini:

1. Luas areal menurun, sehingga kontribusi kapas dalam negeri semakin kecil.

2. Produktivitas rendah, dikarenakan kapas bukan merupakan tanaman utama, sehingga pemeliharaan kurang intensif.
3. Ketergantungan petani terhadap pestisida kimia, sehingga musuh alami hama ikut mati sewaktu petani mengaplikasikan pestisida tersebut. Akibat lebih lanjut lagi yaitu semakin meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) sehingga produktivitas menurun.
4. Harga kapas berbiji yang dihasilkan petani lebih rendah dibanding harga komoditas pangan sehingga petani mengutamakan tanaman pangan.
5. Kelompok tani kapas sudah terbentuk, namun berbagai komoditas yang diusahakan petani di daerah pengembangan kapas, berakibat perhatian petani tidak fokus pada kapas namun berbagi dengan komoditas lainnya. Di samping itu seorang petani bisa mengikuti berbagai kelompok tani komoditas yang diusahakan di daerah pengembangan kapas.
6. Pengadaan benih gundul (*delinted seed*) dilaksanakan oleh pengelola kapas dan petani tinggal membeli dari pengelola dengan harga Rp45.000,00- per kg. Namun yang perlu diperhatikan yaitu pengiriman benih kepada petani kapas kadang-kadang tidak tepat waktu (terlalu dini atau terlambat). Apabila terlalu dini dikhawatirkan cara penyimpanan benih kapas di tingkat petani kurang baik, apabila terlambat maka dikhawatirkan waktu tanam terlambat, sehingga berisiko kekurangan air pada masa pertumbuhan, terutama kapas yang dikembangkan di lahan kering/tadah hujan.

SARAN PENGEMBANGAN KAPAS DI INDONESIA

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, disarankan:

1. Pemerintah agar mempertahankan areal kapas yang ada bahkan meningkatkan areal tersebut dengan cara mendorong perusahaan swasta (BUMN) untuk mengusahakan perkebunan kapas sebagai inti serta dapat mendorong petani sekitar perkebunan sebagai plasma.
2. Penanaman varietas unggul yang disertai dengan “*supporting system*” di bidang pengadaan sarana produksi, kredit produksi, dan penetapan harga kapas yang menguntungkan petani.
3. Penggunaan pestisida kimia harus dikurangi dan pengendalian hama terpadu (PHT) harus diterapkan dengan benar serta meningkatkan penggunaan pestisida nabati.
4. Pengadaan “*ginnery*” mini yang dikelola oleh kelompok tani, sehingga petani bisa menjual serat kapas maupun dimanfaatkan untuk membuat kain tenun serta dapat menjual maupun memanfaatkan biji kapas.
5. Pendampingan teknologi budi daya kapas oleh penyuluh maupun petugas khusus kapas harus lebih intensif, agar transfer teknologi budi daya lebih cepat.

Kapas varietas unggul telah dihasilkan oleh para peneliti Balittas yaitu Kanesia 1 sampai dengan 15. Produktivitasnya berkisar 600 kg s.d. 1.000 kg kapas berbiji per hektar di tingkat petani dan hasil potensial 2,50 ton kapas berbiji per hektar pada tingkat penelitian (Hasnam *et al.* 2007; Sulistyowati 2009). Padahal dengan teknologi pemberian air yang modern yaitu dengan mesin penyiram “*center pivot*” (10 kali pemberian air) dan pemberian pupuk organik (\pm 10 ton per hektar) serta anorganik (6 kuintal per hektar, terdiri atas campuran pupuk tunggal dan pupuk lengkap) yang diusahakan PT Ade Agro Industri (PT AAI) di Kabupaten Sumba Timur, NTT dapat menghasilkan 1,6 ton sampai dengan 6,5 ton atau rata-rata 4,8 ton kapas berbiji per hektar (Deciyanto 2009).

Di samping itu untuk meningkatkan produktivitas kapas dan pendapatan petani telah diupayakan oleh instansi terkait dalam pengembangan kapas, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan di daerah pengembangan kapas dan Balittas dalam bentuk pendampingan teknologi budi daya. Hasil pendampingan budi daya tumpang sari kapas + jagung di Kabupaten Blora MTT 2009 menunjukkan bahwa dengan penggunaan pupuk yang lebih hemat (154 kg urea + 173 kg Phonska dengan 8,9 cc greentonic) per hektar dan 2 liter pestisida nabati (Organeem) serta pemberian air sederhana (200 cc air + 3 gram pupuk per tanaman) sebanyak tiga kali. Produksi kapas yang diperoleh sebanyak 1.024 kg kapas berbiji per hektar dan jagung sebesar 914 kg jagung pipil kering per hektar. Pendapatan usaha tani yang diperoleh sebesar Rp2.888.870,00 per hektar (Sulistyowati 2009).

Pendapatan usaha tani tersebut lebih besar dari pada petani pembanding (tumpang sari kapas+jagung dan jagung monokultur) yaitu masing-masing sebesar Rp1.849.309,00 dan Rp1.920.114,50 per hektar. Padahal penggunaan pupuk kedua pola tanam tersebut masing-masing lebih dari 500 kg per hektar (Sulistyowati 2009).

PENUTUP

- Kebutuhan serat kapas sebagai bahan baku sandang di dalam negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat, begitu juga ekspor kain dan pakaian jadi. Pengadaan kapas sebagai bahan baku sandang perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan akan serat kapas impor. Tantangan pengembangan kapas di dalam negeri cukup banyak, di antaranya: keterbatasan pemilikan lahan dan modal petani, harga kapas lebih rendah dibanding tanaman pangan, produktivitas rendah, serta ketergantungan akan pestisida kimia.
- Peran serta pemerintah sangat diperlukan untuk mencari solusi yang terbaik guna mengatasi permasalahan/tantangan yang ada agar berdampak positif untuk pengadaan kapas di dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, T., M. Sahid & Y.P. Wanita. 2007. Pengembangan kapas di Indonesia dan permasalahannya. *Dalam* Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. hlm. 142–146.
- Deciyanto S. 2009. Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kepala Balittas ke PT AAI Waingapu, Kabupaten Sumbawa Timur, NTT. Dipresentasikan pada Rapat Program Serat Buah di Ruang Boechmeria Balittas, Malang, tanggal 19 November 2009.
- Djamaludin, J.C. 2007. Dampak strategis industri TPT nasional menanggapi pencabutan subsidi ekspor kapas negara maju. *Dalam* Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. hlm. 24–32.
- Hasnam, E. Sulistyowati, Nurheru, Sudjindro & R.S. Hartati . 2007. Peran teknologi dan kelembagaan dalam pengembangan kapas dan rami. *Dalam* Prosiding Lokakarya Nasional Kapas dan Rami. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. hlm. 40–50.
- Kadarwati, F.T. & A.A. Rahmianna. 2006. Kompatibilitas palawija dengan kapas di lahan sawah tadah hujan. *Dalam* Prosiding Lokakarya Revitalisasi Agribisnis Kapas Diintegrasikan dengan Palawija di Lahan Sawah Tadah Hujan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor. hlm. 1–14.
- Lahiya, A.A. 1984. Tanaman Kapas (Sejarah Pengembangan dan Pembudidayaannya) di Indonesia. Bandung. 69 hlm.
- Nurindah, E. Sulistyowati, M. Sahid & T. Basuki. 2008. Persiapan Pelepasan Varietas Kapas Tahan *A. biguttula*. Laporan Akhir Rencana Diseminasi Hasil Penelitian Kegiatan ke-4. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang. 8 hlm.
- Sahid & S.A. Wahyuni. 2001. Keragaan dan konsep perbaikan pengembangan kapas di Indonesia. *Dalam* Monograf Balittas No. 7: Kapas Buku 1. Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat, Malang. hlm. 1–10.
- Soekartawi, A. Soeharjo, J.L. Dillon & J.B. Hardaker. 1985. Ilmu Usahatani dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. UI Press, Universitas Indonesia, Jakarta. 83 hlm.
- Sulistyowati, E. 2009. Perakitan Kapas Hibrida dan Varietas Tahan *A. biguttula*, *H. armigera* dan *P. gossypiella* Berproduktivitas >3 ton. Laporan Akhir Rencana Diseminasi Hasil Penelitian. Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang. hlm. 73–75.
- Teken, I.B. & S. Isnawi. 1981. Teori Ekonomi Mikro. Institut Pertanian Bogor, Bogor.